

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. H. KOESMAYADIE TATANG P.

Jabatan

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak KESATU

Nama

: AHMAD HERYAWAN

Jabatan

: Gubernur Jawa Barat

Selaku atasan PIHAK KESATU, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

AHMAD HERYAWAN

Bandung,

2016

N.

Ir. H. KOESMAYADIE TATANG P.
Pembina Utama Madya

PIHAK KESATU,

NIP. 19590920 198303 1 013

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas	Persentase Desa yang Lembaga	45%
	Kelembagaan Masyarakat,	Kemasyarakatannya berperan aktif	
	Kehidupan Sosial Budaya	Persentase Desa yang	47,08%
	dan Pengembangan	Melaksanakan Gotong Royong	
	Partisipasi serta	Persentase Desa/Kelurahan yang	51,30%
	Keswadayaan Masyarakat	peran serta masyarakatnya baik	
		dalam pembangunan	
		4. Persentase Desa yang	64,99%
		keswadayaannya meningkat sesuai	
		target	
		5. Persentase Desa yang BUMDesnya	40%
		telah memberikan bantuan	
		permodalan kepada masyarakat	
		6. Persentase Desa yang memiliki	55%
		Pasar Desa	
		7. Persentase desa yang telah memiliki	20%
		wartek	
		Persentase Desa yang telah	
		memanfaatkan SDA berwawasan	20%
		Lingkungan	
2.	Meningkatnya Kapasitas	Persentase Desa yang aparaturnya	30,60%
	Pemerintahan	memiliki kompetensi sesuai standar	
	Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang memiliki	40,70%
		Kantor Desa di atas tanah kas desa	
		3. Persentase desa yang lebih dari 50%	40,70%
		APBDes digunakan untuk	
		pembiayaan pembangunan	
3.	Meningkatnya Infrastruktur	Persentase Desa yang memiliki	65%
	Perdesaan	Infrastruktur Jalan Desa sudah baik	

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan,Pengedalian dan Evaluasi	Rp.	900.000.000,-	APBD
	Pembangunan Daerah			
2.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Rp.	16.500.250.000,-	APBD
	dan Partisipasi Masyarakat			
3.	Program Pemantapan Pemerintahan dan	Rp.	4.150.000.000,-	APBD
	Pembangunan Desa			
4.	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Rp.	3.800.000.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran	Rp.	2.750.000.000,-	APBD
	Serta Masyarakat dalam Pembangunan			

Bandung,

2016

**GUBERNUR JAWA BARAT** 

AHMAD HERVAWA

KEPALA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT

Ir. H. KOESMAYADIE TATANG P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590920 198303 1 013